ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI KONSEPSI *RESTORATIVE JUSTICE*

Annisyakira Egiana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: annisyakiraegiana02@gmail.com

Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimakumara@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p16>

ABSTRAK

Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi satu dari perkara serius dalam sistem pemasyarakatan yang berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan efektivitas pembinaan warga binaan. Masalah ini muncul akibat tingginya angka tindak pidana dan keterbatasan kapasitas lapas yang hanya mampu menampung sebagian kecil dari jumlah narapidana yang ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis penerapan konsepsi *restorative justice* sebagai alternatif untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer seperti “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum” beserta peraturan yang berkaitan dengan *restorative justice* lainnya untuk menanggulangi adanya kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan. Hasil studi memperlihatkan bahwa *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat, dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi penghuni lapas. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, dan kompensasi tanpa pemenjaraan, khusus untuk tindak pidana ringan. Selain itu, kebijakan seperti pidana bersyarat dan program rehabilitasi sosial turut mendukung pengurangan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerapan *restorative justice* juga dapat menekan tingkat residivisme, mengurangi stigma atau pandangan sosial terhadap mantan narapidana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan optimalisasi penerapan konsep ini, sistem pemasyarakatan diharapkan mampu mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sekaligus mengurangi beban negara dalam pengelolaan lapas.

Kata Kunci: kelebihan kapasitas lapas, *restorative justice*, sistem pemasyarakatan, alternatif pemenjaraan

ABSTRACT

The excess capacity of correctional institutions (prisons) in Indonesia is one of the serious problems in the correctional system that has an impact on the health, security, and effectiveness of fostering inmates. This problem arises due to the high number of crimes and the limited capacity of prisons which are only able to accommodate a small part of the existing number of inmates. This study aims to analyze the application of the conception of *restorative justice* as an alternative to overcapacity in prisons. The research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, analyzing primary legal materials such as “Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Correctional Services”, “Decree of the Director General of the General Judiciary Agency Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of *Restorative Justice* in the General Judiciary” and other regulations related to *restorative justice* to overcapacity in the prison. The results of the study show that

restorative justice, which focuses on restoring the condition of perpetrators, victims, and the community, can be an effective solution in reducing prison inmates. This approach allows for the resolution of cases through dialogue, mediation, and compensation without imprisonment, especially for minor offenses. In addition, policies such as conditional sentences and social rehabilitation programs also support the reduction of the number of inmates in prisons. The implementation of restorative justice can also reduce the level of recidivism, reduce social stigma against former prisoners, and increase public trust in the legal sistem. By optimizing the application of this concept, the correctional sistem is expected to be able to achieve the goals of rehabilitation and social reintegration, as well as reduce the burden on the state in prison management.

Keywords: *excess prison capacity, restorative justice, correctional sistem, alternative imprisonment*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak lepas dari masalah kejahatan serta upaya pemulihan ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Terlebih Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang juga negara kesejahteraan/*welfare state*, memang sudah seharusnya terlepas dari problem kejahatan dan penjahat. Setiap individu memiliki hak yang setara untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya. Masing-masing individu harus menerima kesempatan dan ruang yang diberikan ketika proses pengadilan untuk membela hak-haknya, hal ini disebutkan pada pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional di Indonesia. Keberagaman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat mencerminkan tindakan yang tidak hanya sejalan dengan hak asasi manusia, tetapi juga selaras dengan norma-norma yang berlaku, tetapi tidak jarang melakukan perbuatan-perbuatan yang asosial bahkan yang melanggar hukum. Tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma hasil kesepakatan bisa mengakibatkan adanya gangguan tatanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tak terelakkan dan selalu mewarnai perjalanan setiap masyarakat di dunia. Kenyataannya, upaya penanggulangan hanya mampu menekan dan meminimalisir angka kejahatan, namun mustahil untuk memusnahkannya secara total.¹

Oleh sebab itu, hukum di Indonesia harus memiliki sistem peradilan pidana yang bersifat khas dan mencerminkan nilai-nilai keadilan untuk meminimalisir angka kejahatan. Sistem peradilan pidana tidak hanya berperan dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Ciri dan karakteristik yang melekat pada sistem peradilan pidana Indonesia harus mampu mengakomodasi keragaman budaya, sosial, dan hukum yang terdapat di tiap-tiap daerah Indonesia. Di samping itu, sistem peradilan pidana perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan berbagai tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan keamanan dan keadilan bagi seluruh warga, sekaligus melindungi hak asasi manusia.² Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice sistem*) ialah pendekatan yang memiliki fokus pada penanganan kejahatan dengan menekankan pentingnya kerja

¹ Bambang Waluyo "Penyelesaian perkara pidana penerapan keadilan restoratif dan transformatif" Jakarta, Sinar Grafika 2020. 22

² Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia" Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 319-331.

sama serta interaksi antara berbagai pihak yang terlibat. Metode ini melihat semua elemen sebagai sebuah kesatuan memiliki korelasi sesama dan memberi pengaruh pada sesama.³ Sistem Pemasyarakatan adalah salah satu elemen kunci pada sistem peradilan yang berada di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mendidik dan membina narapidana juga para anak yang sedang menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan, sehingga nantinya mereka mampu kembali lagi kepada masyarakat sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan taat hukum setelah menyelesaikan masa hukuman. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah satu-satunya tempat untuk terpidana menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada sistem peradilan pidana. Definisi lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan institusi yang memiliki tugas memberikan pembinaan bagi pada narapidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Mengenai Pemasyarakatan”.⁴

Pada praktiknya, sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama yaitu kelebihan kapasitas atau *Overcapacity* merupakan kondisi dimana Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang melebihi kapasitas karena tingginya angka tindak pidana.⁵ Berdasarkan data per 20 Agustus 2024 oleh laman website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia total penghuni 272.908 sedangkan kapasitas seharusnya yang layak huni hanya untuk 145.333 penghuni.⁶ Jumlah penghuni yang ada melebihi kapasitas yang seharusnya hingga hampir 88% (Delapan Puluh Delapan Persen), Kondisi kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan menimbulkan berbagai dampak serius. Para narapidana dan tahanan mengalami penurunan kesehatan fisik serta tekanan mental yang signifikan. Situasi ini memicu gesekan dan pertikaian di antara sesama penghuni. Program pembinaan pun menjadi terhambat dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang diberlakukan. Dari segi anggaran, terdapat pembengkakan biaya operasional untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan bahan pangan. Yang paling mengkhawatirkan, minimnya pengawasan akibat ketidakseimbangan rasio petugas dengan jumlah warga binaan berpotensi memicu kerusuhan hingga upaya pelarian diri dari tahanan.⁷ Kedua yaitu tingginya angka *recidivism*, yaitu angka pengulangan kejahatan oleh narapidana yang telah selesai menjalani pidana. Salah satu aspek yang memengaruhi adalah kondisi lingkungan, khususnya terkait bagaimana masyarakat menerima keberadaan warga binaan pemasyarakatan. Sering kali, narapidana memperoleh stigma yang buruk dari masyarakat, hal tersebut mengakibatkan sulitnya terjadi reintegrasi sosial pada warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini, pembina kemasyarakatan memiliki peran penting untuk mendampingi dari proses reintegrasi sosial dengan memberikan

³ Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah, and Lalu Adnan Ibrahim. “Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (2022).

⁴ Hasan, Asriani. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bulukumba Phd Diss Universitas Bosowa 2022. (Skripsi)”

⁵ Perkasa, Risang Achmad Putra. “Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan” *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 108-115.

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024, Dashboard Jumlah Penghuni *Update*, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>.

⁷ Triana, Ikama Dewi Setia, dan Eti Mul Erowati. “*Restorative Justice* Sebagai Solusi Mengatasi Kelebihan kapasitas Lapas Di Indonesia” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (2022): 215.

edukasi pada keluarga serta tokoh masyarakat sekitar, sumapay mereka tidak enggan untuk memberi dukungan secara positif pada warga binaan permasyarakatan.⁸ Dan yang ketiga adalah rendahnya tingkat rehabilitasi, yaitu rendahnya tingkat keberhasilan dalam memperbaiki diri narapidana dan gagalnya pembinaan di lembaga permasyarakatan (Lapas). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem permasyarakatan di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan sistem permasyarakatan di Indonesia.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam pembaruan sistem permasyarakatan di Indonesia adalah Restorative Justice. Pendekatan ini menekankan keadilan restoratif dengan fokus pada pemulihan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk menyelesaikan dampak yang ditimbulkan secara bersama-sama, dengan tujuan memulihkan keadaan semula. Restorative Justice berpotensi mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan karena mendorong penyelesaian perkara di luar pemidanaan penjara. Dengan mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi, jumlah narapidana yang harus ditahan dapat dikurangi secara signifikan. Dasar hukum pendekatan ini tertuang dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, di mana Pasal 5 menetapkan syarat materiel seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, serta tidak berlaku bagi pelaku residivis atau tindak pidana yang bersifat radikal.⁹ Oleh karena itu, penerapan prinsip Restorative Justice perlu diperkuat sebagai strategi solutif dalam menjawab permasalahan mendesak dalam sistem permasyarakatan, khususnya untuk mengatasi kelebihan kapasitas secara berkelanjutan dan berkeadilan

State of the art, dijadikan rujukan dalam penyusunan penelitian ini yang membahas bagaimana analisis yuridis penanggulangan kelebihan kapasitas pada lembaga permasyarakatan melalui konsepsi *restorative justice* untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga permasyarakatan di Indonesia yaitu kelebihan kapasitas atau *overcapacity*. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya yang pertama dengan judul “RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS LAPAS DI INDONESIA” oleh Ikama Dewi Setia Triana dan Eti Mul Erowati¹⁰ membahas mengenai menganalisa tentang *restorative justice* berperan menjadi solusi untuk menuntaskan kapasitas yang berlebih di lembaga permasyarakatan di Indonesia dimana khusus membahas salah satu permasalahan di lembaga permasyarakatan yaitu kelebihan kapasitas. Dan dalam penelitian sebelumnya yang kedua yang berjudul “OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA MENGURANGI OVERCAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN” oleh Risang Achmad Putra Perkasa¹¹ membahas mengenai faktor penyebab, dampak dan solusi dari permasalahan kelebihan kapasitas pada lembaga permasyarakatan di Indonesia.

⁸ Poetra, Muhamad Ega Setiawan, and Padmono Wibowo. “PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH RESIDIVISME PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA BARAT” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 190-200.

⁹ Hambali, Azwad Rachmat. “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69-77.

¹⁰ Triana, Ikama Dewi Setia, dan Eti Mul Erowati, op.cit. (213)

¹¹ Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 263-276.

1.2 Rumusan Masalah

Maka sesuai dasar yang sudah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka hal yang ingin dikaji oleh penulis adalah bagaimana analisis yuridis penanggulangan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan melalui konsepsi *restorative justice*, sehingga dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang nantinya dikaji pada jurnal ini, di antaranya:

1. Bagaimana konsep dan regulasi mengenai *restorative justice* yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana konsep *restorative justice* dapat menanggulangi kelebihan kapasitas yang dihadapi oleh sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Ditulisnya jurnal ini dengan maksud agar pembaca mampu memahami lebih dalam mengenai bagaimana analisis yuridis penanggulangan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan melalui konsepsi *restorative justice*. Adapun yang secara luas studi ini dimaksudkan guna memberi pemahaman secara lebih dalam perihal konsep *restorative justice*, regulasi yang mengenai *restorative justice*, dan penanggulangan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai upaya ilmiah yang mengacu dalam sebuah metodologi, pendekatan sistematis, dan penalaran analitis, yang bertujuan untuk memahami isu-isu tertentu atau fenomena hukum lainnya melalui analisis. Metode adalah upaya ilmiah yang berkaitan dengan pendekatan prosedural dalam menyelidiki subjek atau objek studi, yang bertujuan untuk memperoleh respons yang valid secara ilmiah. Studi ini menerapkan metode berupa penelitian hukum normatif. Serta pendekatan yang ditetapkan ialah bahan hukum primer yaitu perUndang-undangan (*Statute Approach*) dengan menganalisa “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan”, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum” beserta peraturan yang berkaitan dengan *restorative justice* lainnya untuk menanggulangi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, serta menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu melakukan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder berupa dokumen yang menjabarkan bahan hukum primer berupa pandangan yang berkembang pada keilmuan hukum terkait topik pembahasan yang akan dibahas. Wujud dari bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-undangan serta perolehan bahan hukum sekunder dari jurnal, buku, karya tulis, pandangan para ahli, dan internet yang dimanfaatkan sebagai pelengkap pada data primer.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep dan Regulasi Mengenai *Restorative Justice* yang Ada di Indonesia

Kerap kali kita mengetahui istilah *Restorative Justice* dalam praktik penegakan hukum pidana. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini diketahui dengan keadilan

¹² Efendi Jonaedi, dan Rijadi Prasetijo “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” Jakarta: Kencana, 2022, Hal 315-316

restoratif yang merujuk pada usaha untuk memulihkan korelasi dan menebus kesalahan yang pelaku lakukan (atau keluarganya) kepada pihak korban (atau keluarganya), yang dilakukan di luar proses peradilan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menuntaskan masalah hukum yang muncul sebab tidak pidana tersebut secara baik, melalui pencapaian kesepakatan dan persetujuan seluruh pihak yang dilibatkan.¹³ Selama ini, Indonesia menerapkan sistem peradilan yang lebih mengedepankan keadilan retributive yang difokuskan pada pelaku pelanggaran yang hanya didasarkan pada tindakan mereka yang melanggar hukum. Pelanggaran terhadap hukum pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak negara, menjadikan negara sebagai korban dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, konsep keadilan retributive tidak mengakomodasi posisi korban, karena konsep ini tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.¹⁴ Namun, yang diharapkan adalah penerapan *Restorative Justice* berarti menjadi sebuah tahap tindak pidana yang mengikutsertakan semua pihak di dalamnya melakukan kolaborasi guna mencari solusi mengenai cara menangani dampak dari kejadian tersebut di masa depan. *Restorative Justice* adalah pendekatan pada penuntasan sebuah masalah pidana dengan memprioritaskan korban, pelaku, serta masyarakat untuk pulih. *Restorative Justice* memiliki prinsip utama yakni terdapat keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, yakni pelaku serta korban, hingga kontribusi masyarakat berperan menjadi fasilitator pada proses penuntasan kasus, guna memastikan supaya pelaku atau anak tidak memberikan gangguan lagi pada keharmonisan yang telah terjalin dalam masyarakat.¹⁵

Dalam pandangan *restorative justice*, tindak pidana dipandang sebagai sebuah pelanggaran yang terjadi pada individu serta hubungan antar individu yang harus lebih menekankan pada tercapainya keadilan. Keadilan ini ditegaskan dengan konsep keadilan yang holistik, yakni keadilan untuk pelaku, keadilan untuk korban, serta keadilan untuk masyarakat. Keadilan restoratif ini dapat diimplementasikan melalui beberapa mekanisme, antara lain: Mediasi antara korban dan pelaku; Musyawarah dengan membawa keluarga keduanya, serta pemberian pelayanan masyarakat yang memiliki sifat rehabilitatif pada keduanya.¹⁶ Penuntasan tindak pidana memiliki prinsip utama menggunakan pendekatan restoratif bukanlah sekadar sebuah cara untuk mendorong berbagai pihak yang berkontribusi mencapai kompromi, melainkan pendekatan tersebut harus memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan pikiran seluruh pihak terkait. Dimaksudkan agar mereka dapat memahami dengan lebih dalam mengenai makna dan tujuan dari pemulihan yang dilakukan. Selain itu, sanksi yang diterapkan dalam proses tersebut haruslah berupa sanksi yang tidak hanya bersifat pemulihan, tetapi juga memiliki unsur pencegahan yang efektif.¹⁷ Penetapan

¹³ Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190.

¹⁴ Anis, Mursal, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama. "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan" *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 575-584.

¹⁵ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

¹⁶ Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis *Restorative Justice*" *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Volume 5 Nomor 01, hlm. 86

¹⁷ Kristian, Kristian, and Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia" *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 592-607.

Restorative Justice di Indonesia diatur pada peundang-undangan. Hal tersebut tercakup pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya dalam "Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan bahwa tiap-tiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, penjangaan, hingga kepastian hukum secara adil, di hadapan huku, perlakuan tersebut harus setara" Selain itu, "Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa masing-masing individu berhak memperoleh aksesibilitas dan perlakuan secara khusus guna mendapatkan peluang dan manfaat yang setara demi meraih kesetaraan serta keadilan. Kedua pasal tersebut sejalan dengan prinsip dasar restorative justice"¹⁸

Merupakan sebuah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman serta berada di atas peradilan, Mahkamah Agung (MA) tentu saja seharusnya mengadopsi serta melaksanakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Lebih lanjut, dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada Pasal 5", secara jelas dikatakan bahwa terdapat kewajiban yang harus dilakukan hakim untuk mencari bermacam nilai yang hidup dan terdapat pada masyarakat, yang dikenal dengan istilah hukum yang hidup (the living law) ataupun kearifan lokal (*local wisdom*). Dengan demikian, terdapat kewajiban bagi hakim untuk melaksanakan pendekatan ini dalam menuntaskan perkara, mengingat pendekatan tersebut relevan dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis. Mahkamah Agung (MA) sendiri telah mengimplementasikan prinsip *Restorative Justice* melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), serta peraturan lainnya. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh MA mengenai *Restorative Justice* ialah "PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi tersangka ataupun terdakwa dalam perkara yang ringan, sehingga mereka tidak butuh untuk menunggu secara berkelanjutan"¹⁹.

Selanjutnya ada dalam "PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" yang mengindikasikan aturan perihal pelaksanaan diversi berdasarkan pada aturan yang terdapat pada UU SPPA. Diversi mengutamakan prinsip kepentingan paling baik pada anak untuk melaksanakan penghukuman dalam bentuk penanganan non formal daripada mendapatkan penghukuman pidana penjara²⁰; "PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum" untuk menjamin gender mengalami kesetaraan yang berkaitan dengan pemenuhan pada berbagai hal penghidupan secara layak bagi pihak perempuan pada masalah cerai talak (ct) serta cerai gugat (cg) dalam peradilan agama, PERMA ini mencerminkan keadilan restoratif dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis

¹⁸ Anugrah, Fajrian Noor. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam" *WASAKA HUKUM* 10, no. 2 (2022): 191-214.

¹⁹ Karya, Muhammad Soma. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP)"

²⁰ Irawati, Arista Candra. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 84 (2021).

pemulihan, penghormatan, dan pemberdayaan perempuan dalam sistem hukum²¹; “SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” dan “SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” untuk menjamin perolehan layanan rehabilitasi yang sesuai pada pengguna narkoba daripada mendapatkan pidana penjara, juga tak lagi dicap sebagai seorang pelaku atau kriminal²².

Selain PERMA dan SEMA Mahkamah Agung juga mengeluarkan “Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 mengenai Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” menekankan pentingnya pendekatan yang ramah anak, berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, dan berbasis konsep *restoratif justice*. Pendekatan ini memberikan perhatian khusus pada hak-hak anak serta dampak psikologis, sosial, dan hukum yang dapat ditimbulkan oleh proses peradilan pidana. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak yang memiliki keterlibatan pada sistem peradilan tidak sekadar dihukum, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, bertanggung jawab atas tindakannya, dan dipulihkan posisinya di tengah masyarakat²³;

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), tujuan pada nota persetujuan ini untuk menyelesaikan batasan pada tindak pidana tipe ringan, jumlah denda, langkah-langkah memeriksa cepat yang focus pada penuntasan perkara pidana tipe ringan melalui pendekatan yang lebih kekeluargaan, dengan mengikutsertakan pelaku, korban, serta masyarakat pada tahap penuntasan konflik. Maksud pada pendekatan ini ialah untuk menciptakan sebuah kesepakatan yang dapat mengembalikan keadaan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta memulihkan keharmonisan sosial dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang diberlakukan di Indonesia.²⁴;

²¹ Nurhilmiah, Nurhilmiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 211-219.

²² Wibowo, Arief, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. “Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 34-39.

²³ Suharto, Gilang Ramadhan. “Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).

²⁴ JCH Tambun, Rustamaji M. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Universitas Sebelas Maret Verstek*, 11(4): 625-633 (2023)

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN mengenai Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, peraturan ini mengatur penyelesaian pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika dengan rehabilitasi medis serta sosial, sebagai alternatif terhadap pemidanaan konvensional. Pendekatan ini sesuai dengan pedoman *restorative justice* yang menekankan pemulihan serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, penerapan *restorative justice* dalam kasus narkotika bertujuan untuk memulihkan kondisi pelaku dan mencegah dampak negatif dari hukuman penjara.²⁵

Selain dari beberapa Peraturan Mahkamah Agung diatas prinsip *restorative justice* juga terdapat pada Undang-undang. Melalui ketetapan “Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak”, Keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan ke dalam sistem peradilan pidana dengan mekanisme diversi, yang harus diterapkan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Diversi dalam penerapan keadilan restoratif ini berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban sekaligus memberikan pembinaan terhadap pelaku anak, dengan tujuan mencegah mereka semakin terlibat pada sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari diversi ini bukanlah untuk meringankan hukuman, melainkan untuk menyediakan penyelesaian yang lebih manusiawi, sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang ditujukan untuk anak-anak yang ikut serta pada tindak pidana.²⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban” merupakan Undang-undang agar memperkuat perlindungan hukum bagi saksi serta korban pada tahap peradilan pidana di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut konsep *restorative justice*, beberapa pasal di dalamnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hak-hak korban dan pelibatan mereka dalam proses peradilan. Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai hak-hak saksi serta korban, termasuk hak atas perlindungan terhadap keamanan personal, keluarga, serta harta benda, dan kebebasan oleh segala bentuk ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, ataupun sudah diberikan. Hak-hak ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan terhadap pemulihan dan perlindungan korban. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait perkembangan perkara, keputusan pengadilan, serta hak untuk mengetahui apabila terpidana dibebaskan. Hal ini mencerminkan transparansi dan pelibatan korban dalam proses peradilan, yang merupakan elemen penting dalam *restorative justice*. **Pasal 7 ayat (1) yang** Memberikan

²⁵ Sinaga, Haposan Sahala Raja. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkotika di Indonesia” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 528-541.

²⁶ Vernanda, Rico. “Penerapan Hukum Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 10 (2024).

hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang ditanggung oleh pelaku kejahatan. Pemberian restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, sesuai dengan tujuan *restorative justice* yang menekankan pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasarakatan” ini memperkuat paradigma baru dalam perlakuan terhadap narapidana, yang berfokus pada reintegrasi sosial daripada hukuman retributif. Tujuannya menciptakan keadilan holistik dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban pelaku, korban, dan masyarakat, memulihkan hubungan, serta menjamin perlindungan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua pihak, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan inklusif.²⁸ **Dijelaskan pada pasal 2** bahwa sistem pemasarakatan diselenggarakan berdasarkan asas penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, non-diskriminasi, dan reintegrasi sosial. Asas reintegrasi sosial sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang bertujuan mengembalikan pelaku ke masyarakat secara bertanggung jawab. Pasal 3 menjelaskan tujuan pemasarakatan, yakni membina Warga Binaan supaya meningkatkan kualitas diri, menjaga kesehatan, dan mempersiapkan mereka untuk kembali berperan di masyarakat. Hal ini menunjukkan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar hukuman. Sementara itu, Pasal 10 mengatur hak-hak Warga Binaan, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, komunikasi dengan keluarga, dan pengembangan potensi diri. Hak-hak ini mencerminkan prinsip *restorative justice*, yang memastikan perlakuan adil dan bermartabat bagi pelaku, sekaligus mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Pendekatan ini turut membantu mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasarakatan, menciptakan kondisi yang lebih aman, serta meningkatkan rasa puas dari korban dan masyarakat terhadap jalannya proses keadilan. UU No. 22 Tahun 2022 menjadi tonggak penting untuk sistem pemasarakatan Indonesia yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban fokus pada pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi serta korban tindak pidana. Perubahan ini memperkuat penerapan ide *restorative justice* pada sistem peradilan pidana Indonesia, yang menekankan pemulihan hak-hak korban dan keterlibatan aktif mereka dalam proses hukum.²⁹ Adapun pasal-pasal terkait adalah **Pasal 1 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa** Restitusi ialah ganti rugi yang diberikan dari pelaku ataupun pihak lain terhadap korban sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian; **Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan** Kompensasi ialah ganti rugi yang diberikan dari negara jika pelaku tidak sanggup membayar restitusi. Ini untuk memastikan korban tetap mendapatkan keadilan; **Pasal 6 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa** Korban kejahatan memiliki hak untuk menerima restitusi atas kerugian yang dialami; dan pada **Pasal 7 Ayat (1)** Korban tindak pidana terorisme berhak menerima kompensasi dari negara untuk membantu pemulihan mereka.

²⁷ Sarbini, Ilyas, and Aman Ma'arij. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana" *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 31-42.

²⁸ Asmawati, Hermi. "Analisis Penguatan Sistem Pemasarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial" *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172-186.

²⁹ Kusyandi, Adi. "Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan" *Yustitia* 10, no. 1 (2024): 49-59.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dibuat untuk Penanganan pada anak yang berhubungan dengan hukum bertujuan untuk mencegah anak terjerat dalam proses peradilan formal, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya. Pendekatan ini menekankan pemecahan yang adil oleh semua pihak yang terlibat, dengan fokus pada pemulihan serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan keadilan restoratif menjadi upaya pemecahan masalah tindak pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terlibat pada pencarian solusi yang adil. Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan diversi dilakukan dalam kerangka keadilan restoratif, bertujuan untuk mencapai perdamaian diantara korban serta anak, memecahkan masalah tanpa melalui tahap peradilan, serta mendukung anak untuk bertanggung jawab. Sementara itu, Pasal 9 Ayat (1) mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diserahkan kepada orang tua atau ikut serta program pendidikan, pembinaan, serta bimbingan yang difasilitasi oleh pemerintah maupun masyarakat. Ketiga pasal ini menitikberatkan pendekatan yang humanis, dengan fokus utama pada pemulihan serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat.³⁰

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana mengatur integrasi konsep *restorative justice* dalam proses penyidikan, hal ini tercermin dalam Pasal 12, yang mengatur bahwa pemecahan tindak pidana bisa dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu syarat utama adalah tindak pidana tersebut tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat, serta adanya pernyataan kesediaan dari pihak-pihak terkait untuk melepaskan hak tuntutan secara hukum. Pendekatan ini mengikutsertakan pelaku, korban, serta komunitas dalam upaya menemukan solusi yang tidak hanya berpusat dalam pemberian hukuman, akan tetapi juga bertujuan memperbaiki dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Pasal 12 memungkinkan penyidik menghentikan proses penyidikan berdasarkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian, aturan ini memberikan alternatif penyelesaian masalah pidana yang lebih humanis serta inklusif.³¹

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif adalah ketetapan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan kepentingan diantara pelaku, korban, serta masyarakat, daripada terhadap pendekatan retributif yang berpusat dalam penghukuman.³² Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pemecahan masalah yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga, serta pihak yang berhubungan untuk mendapat pemecahan yang adil melalui pemulihan, bukan pembalasan. Pasal 3 menyatakan penghentian penuntutan

³⁰ Anshori, Anshori. "Pola Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Lamongan Dalam Perspektif Restorative Justice: Studi Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lamongan" *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 344-368.

³¹ Hariyanto, Didik. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi" *Janaloka* 2, no. 1 (2023): 114-134.

³² Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-193.

dilakukan berdasarkan “asas cepat, sederhana, biaya ringan, keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan kepentingan masyarakat”. Pasal 5 Ayat (1) mengatur syarat pemberhentian tuntutan, seperti tindak pidana pertama kali, ancaman pidana di bawah 5 tahun, dan adanya kesepakatan perdamaian. Pasal 6 Ayat (1) mewajibkan jaksa memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan menghindari stigma. Pasal 7 Ayat (1) menekankan perlunya keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Peraturan ini berorientasi pada pemulihan hubungan, perlindungan hak semua pihak, dan menciptakan keadilan yang lebih humanis dan efektif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menegaskan komitmen Polri pada penerapan konsep *restorative justice*. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pemecahan tindak pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak yang berhubungan agar bersama-sama mendapatkan pemecahan yang adil yang memusatkan pemulihan ulang terhadap kondisi awal, serta bukan pembalasan. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik bisa menggunakan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Penerapan keadilan restoratif oleh Polri melalui Peraturan ini memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan efisien, serta mengurangi beban lembaga peradilan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif menjadi Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa mengatur pemecahan masalah penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa. Pedoman ini memberikan peran penting bagi jaksa untuk menentukan arah penyelesaian perkara dengan mengutamakan rehabilitasi pelaku dibandingkan hukuman retributif. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan diantara pelaku, korban, serta masyarakat, dan mendukung reintegrasi sosial pelaku. penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan peluang bagi pelaku untuk menjalani rehabilitasi dan kembali produktif di masyarakat. Pendekatan ini meningkatkan kepuasan masyarakat karena menekankan pemulihan dan keseimbangan hak semua pihak. Pedoman ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis, berorientasi pada rehabilitasi, dan mendukung keadilan holistik.³³

3.2 Konsep Restorative Justice dapat Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas yang Dihadapi oleh Sistem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Kelebihan jumlah di lembaga pemasyarakatan (lapas) Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada fungsi pembinaan dan keamanan. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kualitas layanan, meningkatnya risiko konflik antar narapidana, dan penyebaran penyakit menular. Menurut data terbaru per 20 Agustus 2024 dari laman resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, total penempatan lembaga pemasyarakatan (lapas) sampai 272.908 orang, sedangkan kapasitas standar yang

³³ Roswari, Bunga, Sukmareni Sukmareni, and Syaiful Munandar. “Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 953-965.

layak huni hanya sebesar 145.333 orang. Dengan demikian, tingkat kelebihan kapasitas lapas saat ini mencapai 88%. Sebagai perbandingan, pada 24 Maret 2023, jumlah penghuni lapas tercatat sebanyak 265.897 orang dengan kapasitas ideal 140.424 orang, menghasilkan tingkat kelebihan kapasitas sebesar 89%. Bahkan, data sebelumnya pada 24 Maret 2022 menunjukkan kondisi yang lebih buruk, dengan 275.166 penghuni dan kapasitas ideal hanya 135.500 orang, sehingga tingkat kelebihan kapasitas mencapai 93%. Kondisi 3 (tiga) tahun terakhir ini menunjukkan bahwa kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah perkara penting yang perlu diatasi di Indonesia.³⁴

Untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, diperlukan upaya alternatif yang bersifat non-institusional. Langkah-langkah tersebut meliputi pemberian pidana bersyarat, *probation*, penangguhan pidana, kompensasi, dan restitusi. Konsep *restorative justice* yang berkembang saat ini juga diyakini mampu mengurangi jumlah narapidana tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Salah satu langkah non-institusional yang dapat diterapkan adalah hukuman bersyarat, seperti yang ditetapkan pada Pasal 14a hingga Pasal 14f KUHP beserta aturan pelaksanaannya. Dengan ketentuan ini, pelaku tindak pidana tidak perlu menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Mekanisme ini secara signifikan berpotensi mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pidana bersyarat juga berfungsi sebagai alternatif terhadap perampasan kebebasan, mirip dengan *probation*. Keuntungannya antara lain: pelaku dapat memperbaiki diri di lingkungan masyarakat, mempertahankan kebiasaan hidup normal, dan menghindari stigma negatif yang biasanya timbul akibat pemenjaraan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dapat ditekan secara efektif.³⁵

Adapun jenis tindak pidana yang sebaiknya dirampungkan dengan *restorative justice* ialah tindak pidana ringan karena pelanggaran yang tidak menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan publik, seperti **Pencurian Ringan menurut Pasal 364 KUHP**, Pencurian dengan jumlah kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000; **Pencurian dengan Pemberatan menurut Pasal 373 KUHP**, Pencurian yang diperbuat oleh orang yang mempunyai hubungan kepercayaan dengan korban. *Restorative justice* memungkinkan penyelesaian melalui dialog dan kompensasi yang disepakati Bersama; **Penipuan menurut Pasal 378 KUHP**, Tindak pidana penipuan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000; **Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP** merupakan Penggelapan barang milik orang lain dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000; **pencurian dalam Keluarga menurut Pasal 379 KUHP** Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000; **Perusakan Ringan Menurut Pasal 407 KUHP**, perusakan barang dengan nilai kerugian kecil dapat diselesaikan tanpa proses litigasi.³⁶ Namun ada pengecualian pada tindak pidana ringan tidak bisa dirampungkan melalui pendekatan *restorative*

³⁴ Rina Agustina, "Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende)" *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. 2 (2023): 157,

³⁵ Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan" *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 108-115.

³⁶ Slat, Teafani Kaunang. "Sanksi Pidana kerja sosial terhadap tindak pidana ringan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 352-360.

justice. Pertama jika pelaku mengulangi tindak pidananya atau residivisme, dan yang kedua yaitu jika tidak adanya kesepakatan dari korban untuk memulihkan hubungan atau menolak mediasi pada pelaku maka proses *restorative justice* tidak dapat dilanjutkan.

Keadilan restoratif bertujuan untuk mengurangi jumlah penghuni penjara, menghilangkan stigma sosial terhadap pelaku, dan mengembalikan mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Selain itu, konsep ini membantu meringankan beban kerja aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, dan mengurangi pengeluaran negara karena tidak lagi berfokus pada hukuman retributif. Dalam keadilan restoratif, pelaku diampuni oleh korban, sehingga rasa dendam dapat diredam. Teori ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat serta korban pada tahap peradilan pidana, yang seringkali terabaikan dalam sistem konvensional. Dengan diterapkannya kebijakan pemerintah dan lembaga hukum yang mendukung pendekatan keadilan restoratif, masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat teratasi. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah narapidana, tetapi juga memastikan kapasitas lembaga pemasyarakatan digunakan sesuai kebutuhan. Lebih jauh, pendekatan ini memungkinkan program pembinaan narapidana berjalan lebih efektif, sehingga tujuan sistem pemasyarakatan, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara maksimal.

4. Kesimpulan

Konsep *restorative justice* di Indonesia menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam penanganan perkara pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta diatur lebih lanjut dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan ini juga diperkuat melalui regulasi Mahkamah Agung, seperti PERMA dan SEMA, yang mendorong penyelesaian perkara ringan dan kasus penyalahgunaan narkoba secara rehabilitatif. Dengan mekanisme seperti diversifikasi, pidana bersyarat, dan kompensasi, *restorative justice* menjadi alternatif terhadap hukuman penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan, sehingga mampu mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, meningkatkan kualitas pembinaan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum melalui proses yang lebih humanis dan reintegratif. Oleh karena itu, sebagai langkah strategis, penerapan *restorative justice* perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan pusat mediasi lokal, edukasi publik, serta optimalisasi program pembinaan narapidana guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo "Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif, dan Transformatif" Jakarta, Sinar Grafika 2020.
- Efendi Jonaedi, dan Rijadi Prasetyo "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Jakarta: Kencana, 2022.
- Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Jurnal Artikel atau Penelitian

- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).
- Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah, and Lalu Adnan Ibrahim. "Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif" *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Hasan, Asriani. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Bulukumba" Phd Diss., Universitas Bosowa, 2022. (Skripsi)"
- Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan" *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Triana, Ikama Dewi Setia, dan Eti Mul Erowati. "Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Kelebihan kapasitas Lapas Di Indonesia" *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (2022).
- Poetra, Muhamad Ega Setiawan, and Padmono Wibowo. "PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH RESIDIVISME PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA BARAT" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana" *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020).
- Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018).
- Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana" Volume 5 Nomor 01.
- Kristian, Kristian, and Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia" *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017).
- Anugrah, Fajrian Noor. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam" *WASAKA HUKUM* 10, no. 2 (2022).
- Karya, Muhammad Soma. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP)"
- Irawati, Arista Candra. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 84 (2021).
- Nurhilmiyah, Nurhilmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019).
- Wibowo, Arief, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian" *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. (2019).

- Suharto, Gilang Ramadhan. "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia" *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- JCH Tambun, Rustamaji M. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana" *Jurnal Universitas Sebelas Maret Verstek*, 11(4) (2023)
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia" *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 7 (2021).
- Vernanda, Rico. "Penerapan Hukum Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 10 (2024).
- Sarbini, Ilyas, and Aman Ma'arij. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana" *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020)
- Asmawati, Hermi. "Analisis Penguatan Sistem Pemasarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial" *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022).
- Kusyandi, Adi. "Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan" *Yustitia* 10, no. 1 (2024).
- Anshori, Anshori. "Pola Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Lamongan Dalam Perspektif Restorative Justice: Studi Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lamongan" *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020).
- Hariyanto, Didik. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi" *Janaloka* 2, no. 1 (2023)
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Roswari, Bunga, Sukmareni Sukmareni, and Syaiful Munandar. "Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Rina Agustina, "Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende)" *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. 2 (2023).
- Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasarakatan" *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Slat, Teafani Kaunang. "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020).

Internet

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024, Dashboard Jumlah Penghuni Update, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>. Diakses pada 23 Desember 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
 dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
 dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
 Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012)
 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
 Peradilan Pidana Anak
 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
 Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017)
 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban
 Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
 Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010)
 SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika
 di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung
 Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik
 Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009,
 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009,
 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan
 Anak yang Berhadapan dengan Hukum
 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik
 Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor
 KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012
 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
 dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan
 Restoratif (Restorative Justice)
 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik
 Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik
 Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan
 Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor
 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-
 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN
 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
 Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative
 Justice di Lingkungan Peradilan Umum
 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
 Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa